

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945).

Ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya bahkan pertahanan-keamanan.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia pembangunan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tersebarnya hasil-hasil pembangunan secara merata. Seers menitikberatkan tujuan pembangunan pada tiga hal yaitu untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi pengangguran, dan mengatasi ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Seers dalam Sudjana, 2004: 178). Data terakhir menunjukkan bahwa Maret 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka 31.02 juta jiwa atau 13.33 % (Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010), sedangkan jumlah tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 370 ribu jiwa pada Februari 2010 (Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XIII, 10 Mei 2010). Tingginya angka kemiskinan tersebut khususnya di daerah pedesaan dan terpencil adalah akibat terjadinya pembangunan yang tidak merata dan berpusat pada kota-kota besar saja sehingga menimbulkan terjadinya arus urbanisasi yang tinggi dari desa ke

kota. Kemiskinan di pedesaan semakin didukung oleh kondisi masyarakat yang mengandalkan pertanian saja sebagai sumber perekonomiannya sehingga menyebabkan angka kemiskinan di pedesaan tidak kunjung menurun.

Tingginya angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang: 1) ekonomi meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan; 2) sosial meliputi aktualisasi diri, partisipasi sosial, interaksi sosial dan; 3) budaya meliputi pelestarian kebudayaan, proses pewarisan kebudayaan, terlaksananya sebuah budaya. Eitzen dan Maxine menyatakan ada tiga gerakan sosial yang dapat mengubah masyarakat, yaitu: (1) *resistance movement*, gerakan penolakan yang mencegah perubahan, (2) gerakan reformasi (*reform movement*) yang berusaha mengubah bagian penting dari suatu masyarakat, serta memperbaiki pendidikan wanita, memperbaiki lingkungan, dan usaha kecil. Ini dilakukan melalui pendidikan atau perubahan peraturan, kebisamaan dan sikap; (3) gerakan mahasiswa (*revolutionary movement*), yang mencari pemecahan dengan perubahan radikal (Eitzen dan Maxine dalam Saleh Marzuki, 2010: 90).

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan lembaga pendidikan khususnya pendidikan non formal dalam rangka pemerataan pembangunan, pengurangan jumlah kemiskinan serta pengangguran dengan melakukan gerakan reformasi melalui pendidikan dan pelatihan serta mencoba memperluas kesempatan kerja yang ditekankan pada pembangunan industri baik industri besar, sedang ataupun industri kecil atau

industri rumah tangga. Pembangunan industri yang bersifat padat tenaga kerja di kawasan pedesaan bermaksud untuk mengurangi atau menghentikan arus urbanisasi dari desa ke kota karena para tenaga kerja dapat terserap oleh industri-industri yang ada di pedesaan sehingga pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai, sedangkan pendidikan dan pelatihan merupakan alat yang digunakan untuk membawa masyarakat menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri dengan tuntutan keterampilan dan kecakapan hidup yang harus dimiliki sebagai salah satu pemenuhan kualifikasi kerja di bidang industri.

Paulston menjelaskan tentang teori fungsi yang menekankan tentang pentingnya hubungan pendidikan non formal dengan pengembangan sosial, ekonomi dan budaya (Paulston dalam Sudjana, 2004: 176). Teori ini memberi makna bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk menumbuhkan dan mengembangkan mekanisme keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai budaya, kesatuan masyarakat, kestabilan ideologi, dan perkembangan ekonomi dalam kesatuan wilayah. Pendidikan non formal dalam pengembangan dan pelaksanaan program memperhatikan beberapa prinsip yakni didasarkan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat; berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar; disusun bervariasi sesuai dengan keragaman kebutuhan pendidikan dan belajar; berperan untuk mewujudkan keterkaitan antara perkembangan sosial dan kemajuan ekonomi serta memberikan pengaruh baik terhadap pelestarian nilai-nilai agama dan budaya terhadap perkembangan

sosial ekonomi sehingga pengembangan pendidikan yang bersifat pelatihan fungsional akan lebih tepat dibandingkan pendidikan kelas yang bersifat teoritis dalam mempersiapkan tenaga kerja dalam bidang industri.

Salah satu bidang industri yang banyak dikembangkan oleh masyarakat pedesaan khususnya di daerah Kabupaten Bantul adalah industri kerajinan tangan salah satunya adalah tekstil, pakaian jadi dan kulit. Industri ini banyak dikembangkan karena secara historis masyarakat di daerah Kabupaten Bantul memiliki keahlian untuk mengolah bahan mentah kain menjadi barang setengah jadi berupa kain batik baik itu batik tulis maupun batik cap. Daerah yang saat ini sudah dikenal sebagai sentra kerajinan batik tulis adalah di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Kemampuan masyarakat Desa Wukirsari dalam bidang membatik berasal dari pengaruh kerajaan Yogyakarta yang saat itu banyak mempekerjakan masyarakat Desa Wukirsari untuk menciptakan kain batik yang akan digunakan oleh keluarga kerajaan. Kemampuan membatik yang diajarkan secara turun temurun ini kemudian dikembangkan menjadi industri rumah tangga oleh masyarakat Desa Wukirsari terutama oleh kaum perempuan. Pembatik yang mayoritas perempuan ini melakoni pekerjaan untuk mencari nafkah pada dasarnya memiliki beberapa faktor yang mendasari kegiatan mereka mencari nafkah, beberapa diantaranya adalah karena tuntutan ekonomi rumah tangga serta kesadaran untuk melestarikan kebudayaan membatik.

Sejak terjadinya gempa tahun 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta perhatian pemerintah maupun lembaga sosial seperti Dompet Dhu'afa, IRE

(Institute Research Empowerment) dan JHS (Jogja Heritage Society) mulai banyak tercurah pada nasib pembatik di Desa Wukirsari yakni dengan merintis pendirian kelompok-kelompok batik, sehingga memunculkan beberapa jenis pembatik diantaranya adalah pembatik lepas, pembatik kelompok dan pembatik lembaga. Pembatik lepas merupakan jenis pembatik yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok batik dan bekerja secara lepas atau bisa juga disebut dengan buruh batik. Pembatik kelompok adalah jenis pembatik yang terdaftar dalam sebuah kelompok rintisan lembaga masyarakat. Pembatik lembaga adalah jenis pembatik yang terdaftar dalam sebuah kelompok dimana kelompok tersebut didirikan atas inisiatif individu atau dengan kata lain ada seorang pengusaha yang mengakomodir para pembatik. Pembatik jenis ini bisa juga disebut dengan pembatik pekerja karena memiliki sistem jam kerja dan pengupahan secara pasti.

Munculnya beberapa jenis pembatik ini selanjutnya memberikan dampak yang berbeda-beda pada penghasilan pembatik serta kualitas pembatik baik pada pembatik lepas, pembatik kelompok, dan pembatik lembaga. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas “Tingkat Kesejahteraan Pembatik Lepas, Pembatik Kelompok dan Pembatik Lembaga Dilihat dari Penghasilan di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat Desa Wukirsari saat ini masih belum mampu mendorong proses pembangunan di bidang ekonomi secara optimal yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tingkat pendapatan keluarga masih rendah dan mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.
2. Tingkat keterampilan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat produktifitas dan kualitas produk sehingga penggunaan cara-cara tradisional belum mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.
3. Munculnya beberapa kategori pembatik yakni pembatik lepas, pembatik kelompok, dan pembatik lembaga yang memiliki perbedaan tingkat produktifitas berdampak pada beragamnya penghasilan pembatik, tingkat kesejahteraan keluarga pembatik serta munculnya kecemburuan sosial.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi mengenai tingkat kesejahteraan keluarga dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya pada pembatik lepas, pembatik kelompok dan pembatik lembaga dilihat dari penghasilan pembatik di Dusun Karangkulon dan Dusun Cengkeh, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah tingkat kesejahteraan keluarga dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya pada

pembatik lepas, pembatik kelompok dan pembatik lembaga dilihat dari penghasilan pembatik di Dusun Karangkulon dan Dusun Cengkeh, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan keluarga khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya pada pembatik lepas, pembatik kelompok dan pembatik lembaga dilihat dari penghasilan pembatik di Dusun Karangkulon dan Dusun Cengkeh, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami deskripsi kesejahteraan keluarga dan penghasilan pembatik deskripsi penghasilan pembatik lepas, pembatik kelompok dan pembatik lembaga di Dusun Karangkulon dan Dusun Cengkeh, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
 - b. Memperoleh pengalaman nyata dan mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang nantinya akan menjadi bidang garapan PLS serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat di bangku perkuliahan.

2. Bagi kelompok industri batik tulis
 - a. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dilihat dari tingkat penghasilan pembatik perempuan.
 - b. Memberikan masukan dalam program pemberdayaan perempuan melalui kelompok industri.
 - c. Mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan membatik dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Bagi pemerintah
 - a. Dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijakan mengenai kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta wawasan pengetahuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok industri.
4. Bagi mahasiswa PLS
 - a. Dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai pengembangan kegiatan pemberdayaan serta menambah pemahaman bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pelatihan *life skill*.